



Kabupaten/Kota Diminta Validasi Kantong Kemiskinan

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mempunyai misi dan menargetkan angka kemiskinan DIY mampu mencapai level 7 persen pada 2022 mendatang. Untuk itu, Pemda DIY meminta kabupaten/kota se-DIY khususnya di sentra-sentra kantong kemiskinan seperti Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo melakukan verifikasi dan validasi data, penguatan substansi khususnya di bidang pertanian, mengubah perilaku miskin hingga mengeluarkan bantuan pembiayaan sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan di DIY yang tergolong tinggi.

Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi menyampaikan angka kemiskinan di Gunungkidul turun 1,5 persen dari 18,65 persen menjadi 17,12 persen pada 2017 lalu. Pemkab Gunungkidul akan melakukan verifikasi dan validasi lebih lanjut pencocokan data terkait persentase angka kemiskinan di Gunungkidul tersebut. "Saya yakin masih ada data yang kurang cocok dan ada kesalahpahaman antara yang dilakukan Pemkab Gunungkidul dengan Pusat Data dan Informasi di pusat sehingga angka persentase kemiskinan di DIY cenderung relatif mengulang tahun-tahun sebelumnya," ujar Immawan usai mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan DIY dipimpin langsung Gubernur DIY Sultan HB X di Bangsal Kepatihan, Kamis (27/12).

Sementara itu, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengungkapkan, daerahnya memiliki kantong-kantong kemiskinan yang harus disasar. Selain pengentasan kantong kemiskinan, Kulonprogo juga memiliki persoalan berkaitan dengan inflasi. Dimana garis kemiskinan yang dulunya 270 sampai 280, namun begitu ada pembangunan Bandara NYIA, batas ambang kemiskinan naik menjadi 323.

Sedangkan Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, target pemerintah kota untuk pengentasan kemiskinan sebenarnya sudah terlampaui, namun kalau untuk target dengan Pemda DIY masih ada selisih 0,07 pada tahun 2018. Guna mengatasi hal itu ada dua hal yang disiapkan, pertama kerja sama antara pemerintah kota dan kabupaten terutama dalam pemenuhan barang-barang produksi yang dimiliki kabupaten untuk bisa diserap di kota begitu pula sebaliknya. Kedua, fokus pada kelompok miskin yang potensi meningkatkan lebih tinggi.

"Peta kemiskinan kota ada di bantaran sungai dari Utara sampai Selatan. Tetapi angka pendapatan yang lebih rendah ada di kawasan Selatan. Misalnya beberapa daerah yang PDRB tinggi tapi jumlah penduduknya juga banyak seperti Umbulharjo. Kami sudah sepakat untuk mengentaskan kelompok-kelompok miskin ke wilayah masing-masing (baik kecamatan maupun kelurahan)," ungkap Heroe. (Ira/Ria)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005